

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN ETIK TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Penelitian di Profesi Dan Pengamanan Kepolisian
Daerah Sumatera Utara)**

Feri Judo Susanto Hamonangan *
Dr. Muhammad Faisal, S.H.,M.H **
Dr. Mukidi, SE., SH., M.H **

ABSTRAK

Oknum Polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum demi keuntungan bisnis narkoba. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba, bagaimana pelaksanaan dan penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba di Sat Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana hambatan penerapan sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba dan upaya penyelesaian hambatan yang dilakukan Sat Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan lapangan serta dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum terhadap anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba adalah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mekanismenya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan sanksi terhadap Anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba adalah melakukan penegakan hukum terhadap oknum anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba melalui peradilan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala penegakan hukum terhadap Anggota Sat Brimob yang terlibat narkoba adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba oleh oknum anggota Kepolisian dan kendala yang dihadapi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah melakukan upaya penanggulangan secara Non Penal melalui upaya pre-emptif, preventif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Secara Bersama-sama

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

***Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AND ETHICS TOWARDS
POLICE OFFICERS WHO COMMIT DRUG CRIMES
(Research Study on Police Profession and Security in North Sumatra
Region)**

Feri Judo Susanto Hamonangan *
Dr. Muhammad Faisal, S.H.,M.H **
Dr. Mukidi, SE., SH., M.H **

ABSTRACT

Police officers who should be law enforcers commit acts that are contrary to the law for the benefit of the narcotics business. The problem in this thesis is how the legal regulation of the application of criminal and ethical sanctions against police members who commit narcotics crimes, how the implementation and application of criminal and ethical sanctions against police members who commit narcotics crimes in the Brimob Unit of the North Sumatra Regional Police, what are the obstacles to the application of criminal and ethical sanctions against police members who commit narcotics crimes and efforts to resolve obstacles made by the Brimob Unit of the North Sumatra Regional Police

This research is a descriptive analysis research that leads to empirical legal research. The data sources in this study are primary data and secondary data. Data collection tools are library and field research and are analyzed qualitatively.

The legal regulation of Brimob Unit members involved in drugs is regulated in Government Regulation Number 1 of 2003 concerning Dismissal of Police Members and Regulation of the Chief of Police No. Pol. 7 of 2006 concerning the Indonesian National Police Professional Code of Ethics, the handling mechanism of which is through the National Police Code of Ethics Commission hearing as regulated in the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Indonesian National Police Code of Ethics Commission. The application of sanctions against members of the Brimob Unit involved in drugs is to enforce the law against members of the North Sumatra Regional Police who have been proven to have committed crimes, especially narcotics crimes, through general trials.

The results of the study show that the obstacles to law enforcement against members of the Brimob Unit involved in drugs are the absence of the alleged violators, the length of the trial process at the District Court, efforts that can be made to overcome the crime of narcotics trafficking by members of the Police and the obstacles faced by the North Sumatra Regional Police are to make non-penal efforts through pre-emptive and preventive efforts.

Keywords: Criminal Acts, Corruption, Together

**Student of the Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I of the Law Program, Islamic University of North Sumatra*

****Supervisor II of the Law Program, Islamic University of North Sumatra*